

IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI MTSN 1 BALANGAN KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN

Muhamad Amirudin¹, Irza Setiawan², M. Fajar Noorrahman³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: amirudin@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan sangat berperan penting dalam perkembangan kehidupan manusia. Dengan memperoleh pendidikan berkualitas tinggi, seseorang dapat meningkatkan harga diri dan berkontribusi positif terhadap lingkungan sekitar. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah melalui Program Indonesia Pintar (PIP), sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan angka kehadiran di sekolah, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu, melalui pemberian pinjaman pendidikan. Didalam Pendidikan sekolah ada yang namanya bantuan sekolah salah satunya PIP namun masih banyaknya kendala menyangkut PIP tersebut, seperti tidak tepat sasaran, keterlambatan pencairan dan terkendala teknis sehingga tidak maksimal terlaksananya program tersebut. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Di Mtsn 1 Balangan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* berjumlah 13 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi PIP pada MTsN 1 Balangan belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari variabel sebagai berikut: *pertama*, pada ukuran kebijakan diketahui bahwa sekolah dapat melaksanakan bantuan PIP yaitu bantuan untuk peserta didik yang kurang mampu. Berikutnya pada indikator mendapat dukungan teoritis bahwa tentunya dukungan teoritis pasti ada karena setiap program sebelum dijalankan tentunya melalui proses yang panjang melalui kajian dan penelitian dan baru bisa dilaksanakan sehingga program ini sudah dapat dilaksanakan demi memberikan pendidikan yang merata kepada siswa. *Kedua*, pada lingkungan tempat kebijakan diketahui indikator lingkungan sosial sekolah dengan mata pencaharian orang tua rata-rata sebagai petani dan pedagang kecil sehingga pendapatan orang tua rendah hal ini sesuai dengan tujuan bantuan PIP. Pada lingkungan politik pemerintah sangat mendukung bantuan PIP ini seperti adanya peraturan menteri dalam PIP. Pada lingkungan ekonomi sesuai adanya pelaksanaan PIP karena tingkat pendapatan orang tua yang rendah sehingga berada pada garis kemiskinan. *Ketiga*, pada variabel Komunikasi antar organisasi diketahui indikator tingkat kompetensi pegawai pelaksanaan PIP sudah baik mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku dan saling berkoordinasi dengan pihak terkait agar pencairan dana PIP dapat dilaksanakan dengan lancar. Pada ketepatan komunikasi pegawai dalam melaksanakan sudah baik menjalankan tugas dan kewajibannya dengan melengkapi data-data penerima PIP untuk diserahkan kepada pihak Bank. *Keempat*, pada variabel Karakteristik badan pelaksana indikator struktur birokrasi pelaksanaan PIP sudah baik sudah sesuai dengan juknis pelaksanaannya. Pada indikator pembahasan PIP sudah baik sesuai peruntukannya untuk siswa yang kurang mampu dari pemilik kriteria tanda keterangan kurang mampu terdapat di desa atau kelurahan.

Faktor yang mempengaruhi yaitu: *pertama*, kurang tepatnya sasaran PIP dikarenakan belum updatenya data. *Kedua*, ketepatan waktu dalam pemberian dana PIP itu terlambat karena proses yang panjang dan bertahap. *Ketiga*, Kurangnya pengetahuan orang tua bahwa orang tua masih belum tepat dalam menggunakan dana PIP untuk kebutuhan sekolah tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kata Kunci : Implementasi Program, Indonesia Pintar, MTSN 1 BALANGAN.

ABSTRACT

Education is believed to have a significant contribution to the development of human resources by getting a decent and good education, a person can become more meaningful both for themselves and their surroundings. PIP is a policy made by the government in an effort to improve the quality of education and reduce the dropout rate for underprivileged students in the form of providing assistance funds. In school education there is something called school assistance, one of which is PIP, but there are still many obstacles regarding the PIP, such as not being on target, late disbursement and technical constraints so that the program is not optimally implemented. Based on this, this study aims to determine the Implementation of the Smart

Indonesia Program (PIP) at Mtsn 1 Balangan, Paringin District, Balangan Regency and the factors that influence the Implementation of the Program.

The study employs a descriptive-qualitative qualitative methodology. Interviews, observation, and documentation are the methods of collection that are employed. Thirteen participants made up the sample size that was obtained by purposive sampling. Following collection, the data is evaluated using methods such as data reduction, data display, and verification or inference.

The results of the study indicate that the implementation of PIP at MTsN 1 Balangan has not been implemented well. This can be seen from the following variables: first, in the policy measure, it is known that the school can implement PIP assistance, namely assistance for underprivileged students. Next, in the indicator of obtaining theoretical support, of course, theoretical support must exist because every program before being implemented certainly goes through a long process through studies and research before it can be implemented so that this program can be implemented in order to provide equitable education to students. Second, in the environment where the policy is known, the social environment indicators of the school with the average livelihood of parents as farmers and small traders so that parents' income is low, this is in accordance with the purpose of PIP assistance. In the political environment, the government is very supportive of this PIP assistance as there is a ministerial regulation in PIP. In the economic environment, it is appropriate for the implementation of PIP because the level of parents' low income so they are on the poverty line. Third, in the Inter-Organizational Communication variable, it is known that the competency level indicator for PIP implementation employees is good, referring to applicable technical instructions and coordinating with related parties so that the disbursement of PIP funds can be carried out smoothly. In terms of the accuracy of employee communication in implementing it, they have carried out their duties and obligations well by completing the data of PIP recipients to be submitted to the Bank. Fourth, in the Characteristics of the implementing agency variable, the indicator for the bureaucratic structure of PIP implementation is good and in accordance with the technical instructions for its implementation. In the PIP discussion indicator, it is good according to its allocation for underprivileged students from owners with criteria of a certificate of underprivileged registered in the village or sub-district.

The contributing factors are: first, inaccurate targeting of PIP due to outdated data. Second, the timeliness of PIP funds disbursement is delayed due to the lengthy and gradual process. Third, a lack of parental awareness that parents are still inappropriately using PIP funds for school needs, but rather for daily needs.

Keywords: Program Implementation, Smart Indonesia, MTSN 1 BALANGAN

PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting dalam kehidupan setiap orang adalah pendidikan. Peranannya sangat signifikan dalam perkembangan kehidupan manusia. Seseorang tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hidupnya sendiri dengan menerima pendidikan berkualitas tinggi, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya..

Selain itu, pendidikan merupakan salah satu cara paling efektif untuk menurunkan angka kemiskinan. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan pendidikan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP), sebuah program yang bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan hingga jenjang menengah dan melindungi siswa dari risiko terkait sekolah.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kelanjutan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program ini merupakan salah satu prioritas utama Presiden Joko Widodo, dan dirancang khusus untuk membantu anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah mengakses layanan pendidikan hingga menunjukkan komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh untuk belajar.

Program PIP telah diterapkan di setiap sekolah di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2014, Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak usia 6 hingga 21 tahun yang merupakan anggota pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KIP berfungsi sebagai identitas dasar untuk memaksimalkan manfaat program PIP ini.

Pemerintah memberikan bantuan pendidikan kepada peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan pedoman yang sesuai dengan standar pendidikan. Rinciannya sebagai berikut: Paket A/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar (SD): Rp225.000 per semester atau Rp450.000 per tahun. Madrasah Tsanawiyah/Paket B/Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP): Rp375.000 per semester atau Rp750.000 per tahun. Madrasah Aliyah/Paket C/Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): Rp500.000 per semester atau Rp1.000.000 per tahun. Peserta kursus yang menawarkan pengajaran standar dalam satu tahun: menerima pembayaran sebesar Rp 1.000.000 per jangka waktu kursus.

“Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yaitu MTsN 1 Balangan yang melaksanakan Program Indonesia Pintar. Masyarakat di kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yang mayoritas pencaharian adalah petani membuat anak-anak mereka mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.”

MTsN 1 Balangan mendapatkan bantuan PIP sebanyak 97 siswa dari 204 siswa yang terbagi menjadi 24 siswa untuk kelas VII, 31 siswa untuk kelas VIII dan 42 siswa untuk kelas IX dengan dana sebesar Rp. 57.000.000 . Masing- masing siswa menerima bantuan sebesar Rp. 375.000 per semester dan ada pula Rp. 750.000 per tahunnya. Siswa tersebut mendapat bantuan PIP dari pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan yang dikirim oleh pemerintah pusat.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya suatu fakta yang menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada PIP di MTsN 1 Balangan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti menemukan adanya beberapa permasalahan di MTsN 1 Balangan, yaitu

1. Distribusi beasiswa kurang tepat karena tujuan PIP adalah untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara kepada masyarakat kurang mampu. Namun, berdasarkan fakta, terdapat beberapa siswa yang berasal dari kelompok mampu menerima dana PIP dan beberapa yang berasal dari kelompok tidak mampu menerima dana PIP, sehingga kelompok sasaran PIP kurang tepat.
2. Sebanyak 123 Siswa yang tergolong keluarga kurang mampu namun yang mendapatkan bantuan PIP hanya sebanyak 91, ada sekitar 32 siswa lagi yang kuranga mampu tidak mendapatkan PIP, dan ada 6 siswa yang tergolong mampu juga mendapatkan bantuan PIP dengan alasan Merika terdata di Dapodik sebagai penerima PIP.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang dana PIP. Dana PIP yang seharusnya dimanfaatkan oleh siswa untuk pembiayaan pribadi siswa dalam rangka penyelesaian pendidikan pada jenjang pendidikan masing-masing siswa penerima PIP.
4. Mengapa pencairan bantuan PIP sering tidak tepat waktu atau sering terlambat karena dalam mekanisme pencairan dana tersebut melalui beberapa proses seperti melengkapi kembali data PIP siswa dengan menyerahkan Kartu Pelajar, Kartu Keluarga dan KTP orang tua. Kemudian diserahkan kepada pihak bank terkait untuk dapat melakukan pencairan, dalam hal ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan verifikasi data dan aktivasi rekening hingga dana bisa di cairkan dari bank terkait. Artinya dalam menjalankan PIP terdapat kesulitan teknis.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI MTSN 1 BALANGAN KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN**”.

METODE

Dalam peneliti ini penulis menggunakan pendekatan dengan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* yang informan sebanyak 13 orang. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi untuk menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat indikator yang berfokus pada teori Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Horn (Marwiyah, 2022:42): adapun hasil wawancara dan observasi sebagai berikut ini:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
 - a. Dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa sekolah MTsN 1 Balangan dapat melaksanakan bantuan PIP yaitu bantuan dari pemerintah untuk siswa yang kurang mampu dari pemilik KIP, pada sekolah tersebut telah dapat melaksanakan bantuan PIP yaitu bantuan untuk peserta didik yang kurang mampu dan untuk mendapatkan bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) dari sekolah pertama, pastikan siswa terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memenuhi kriteria penerima PIP, seperti memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau jika tidak memiliki, melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu

(SKTM). Kedua, siswa atau orang tua dapat mendaftar secara mandiri melalui situs resmi PIP atau aplikasi Cek Bansos, atau melalui sekolah dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen persyaratan. Ketiga, pihak sekolah akan melakukan verifikasi data dan mengajukannya ke Dinas Pendidikan, yang kemudian akan diteruskan ke Kementerian Pendidikan untuk diverifikasi lebih lanjut. Terakhir, siswa dapat memantau status penerimaan PIP melalui situs resmi PIP dengan memasukkan NISN dan nama ibu kandung.

b. Mendapat Dukungan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada MTsN 1 Balangan dapat disimpulkan bahwa *dukungan teoritis* ini ada karena PIP ini adalah bantuan pemerintah yang sudah melalui beberapa kajian agar bisa terlaksana dengan baik namun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan petunjuk teknis pada halnya ketidak ketepatan sasaran penerima PIP dan pencairan dana PIP yang membutuhkan waktu yang lama.

2. Sumber Kebijakan.

a. Lingkungan Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada MTsN 1 Balangan dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan sosial MTsN 1 Balangan sesuai karena rata-rata mata pencaharian orang tua siswa sebagai Petani sehingga sesuai dengan *lingkungan sosial* masyarakat agar anak-anak mereka bisa bersekolah sampai lulus dengan adanya bantuan PIP.

b. Lingkungan Politik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada MTsN 1 Balangan dapat disimpulkan bahwa *lingkungan politik* pada MTsN 1 Balangan mendukung adanya bantuan PIP sebagaimana telah adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dan terdapat pengelola PIP pada sekolah.

c. Lingkungan Ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada MTsN 1 Balangan bahwa dapat disimpulkan kondisi lingkungan ekonomi sesuai dengan tujuan pelaksanaan karena tingkat pendapatan orang tua yang rendah sehingga berada pada garis kemiskinan hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan PIP.

3. Komunikasi organisasi dan kegiatan pelaksanaan.

a. Tingkat Kompetensi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa *tingkat kompetensi* pegawai dalam menjalankan PIP kurang baik karena masih terkendala koordinasi dengan pihak bank terkait dan juga pekerjaan yang tumpang tindih sehingga pada pelaksanaan PIP ini terdapat keterlambatan dalam hal pencairan dana PIP dikarenakan tingkat kompetensi pegawai dalam menjalankan PIP kurang baik karena masih kurangnya koordinasi yang baik dari pihak bank sehingga pencairan dana PIP yang terlambat dan juga pekerjaan yang tumpang tindih sehingga pada pelaksanaan PIP ini terdapat keterlambatan dalam hal pencairan dana PIP.

b. Ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa *Ketepatan komunikasi* antar para pelaksana dalam membantu pelaksanaan PIP sudah baik menjalankan tugas dan kewajibannya serta dengan mengikuti pelatihan tentang PIP dapat dilihat bahwa Ketepatan komunikasi antar para pelaksana pegawai dalam membantu pelaksanaan PIP sudah baik menjalankan tugas dan kewajibannya serta dengan mengikuti pelatihan tentang PIP.

4. Karakteristik badan pelaksana.

a. Struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada MTsN 1 Balangan dapat disimpulkan bahwa pada sekolah tersebut telah dapat melaksanakan bantuan PIP yaitu bantuan untuk peserta didik yang kurang mampu sesuai *struktur birokrasi* dengan alur juknes.

b. Pembahasan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada MTsN 1 Balangan dapat disimpulkan bahwa pada *pembahasan* di sekolah tersebut telah dapat melaksanakan bantuan PIP yaitu bantuan untuk peserta didik yang kurang mampu yaitu dengan persyaratan terdata sebagai masyarakat kurang mampu di Desa atau kelurahan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Di MtsN 1 Balangan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan” terdiri dari :

a. Kurang Tepatnya Sasaran PIP.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai ketidak tepatan sasaran PIP ini dikarenakan belum updatenya data sehingga keadaan dilapangan berbeda dengan data dinas sosial.

- b. Pencairan dana PIP yang belum tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pencairan dana PIP masih belum tepat waktu dikarenakan data-data penerima PIP belum lengkap dan pada bank mempunyai prosedur yang panjang dan bertahap.

- c. Kurangnya Pengetahuan Orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dilihat bahwa orang tua masih belum tepat dalam menggunakan dana PIP untuk kebutuhan sekolah tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bukan memprioritaskan untuk anak sekolah.

Faktor yang Mendukung Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Di Mtsn 1 Balangan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

- a. Ada Bimtek Untuk Pihak Sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi disimpulkan bahwa kegiatan bimtek telah diselenggarakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Balangan yang diwakili oleh Kepala MTsN 1 Balangan untuk kelancaran program PIP yang ada di MTsN Balangan

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada MTsN 1 Balangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara Implementasi PIP pada MTsN 1 Balangan belum baik. Hal ini dapat dilihat dari variabel sebagai berikut: *pertama*, pada ukuran kebijakan diketahui bahwa sekolah dapat melaksanakan bantuan PIP yaitu bantuan untuk peserta didik yang kurang mampu namun masih ada siswa yang kurang mampu tidak terdata. Berikutnya pada indikator mendapat dukungan teoritis bahwa tentunya dukungan teoritis pasti ada karena setiap program sebelum dijalankan tentunya melalui proses yang panjang melalui kajian dan penelitian dan baru bisa dilaksanakan sehingga program ini sudah dapat dilaksanakan demi memberikan pendidikan yang merata kepada siswa namun masih ada siswa yang kurang mampu tidak mendapatkan PIP tersebut. *Kedua*, pada lingkungan tempat kebijakan diketahui indikator lingkungan sosial sekolah dengan mata pencaharian orang tua rata-rata sebagai petani dan pedagang kecil sehingga pendapatan orang tua rendah hal ini sesuai dengan tujuan bantuan PIP tetapi ada juga siswa yang mampu mendapatkan bantuan PIP. Pada lingkungan politik pemerintah sangat mendukung bantuan PIP ini seperti adanya peraturan menteri dalam PIP. Pada lingkungan ekonomi sesuai adanya pelaksanaan PIP karena tingkat pendapatan orang tua yang rendah sehingga berada pada garis kemiskinan. *Ketiga*, pada variabel Komunikasi antar organisasi diketahui indikator tingkat kompetensi pegawai pelaksanaan PIP walaupun dilaksanakan dengan baik mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku dan saling berkoordinasi

dengan pihak terkait agar pencairan dana PIP dapat dilaksanakan dengan lancar namun tetap saja tidak semua siswa yang kurang mampu mendapatkan program tersebut. Pada ketepatan komunikasi pegawai dalam melaksanakan sudah baik menjalankan tugas dan kewajibannya dengan melengkapi data-data penerima PIP untuk diserahkan kepada pihak Bank. *Keempat*, pada variabel Karakteristik badan pelaksana indikator struktur birokrasi pelaksanaan PIP sudah baik sudah sesuai dengan juknis pelaksanaannya. Pada indikator pembahasan PIP sudah baik sesuai peruntukannya untuk siswa yang kurang mampu dari pemilik berkriteria tanda keterangan kurang mampu terdaftar di desa atau kelurahan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi PIP pada MTsN 1 Balangan terdiri dari.

- a. Faktor menghambat yaitu: *pertama*, kurang tepatnya sasaran PIP dikarenakan belum updatenya data. *Kedua*, ketepatan waktu dalam pemberian dana PIP itu terlambat karena proses yang panjang dan bertahap. *Ketiga*, Kurangnya pengetahuan orang tua bahwa orang tua masih belum tepat dalam menggunakan dana PIP untuk kebutuhan sekolah tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Faktor yang mendukung yaitu: *pertama*, adanya bimtek terkait PIP. *Kedua*, adanya sosialisasi sekolah kepada orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi PIP pada MTsN 1 Balangan Kabupaten Balangan penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kementrian Agama Kabupaten Balangan agar lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat terkait tujuan dan pelaksanaan PIP, memperjelas batasan waktu pelaksanaan pada setiap tahapan pelaksanaan PIP, sehingga penyelenggara disekolah tidak tanpa batasan waktu, dan pencairan dana PIP sebaiknya di awal tahun pembelajaran sehingga sesuai dengan kebutuhan siswa untuk pendidikan.
2. Kepada Kepala Sekolah MTsN 1 Balangan Kabupaten Balangan agar dapat membantu untuk mengusulkan siswa yang kurang mampu yang belum memiliki KIP dengan bekerjasama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan dan Dinas Sosial Kabupaten Balangan supaya penerima bantuan dan PIP bisa lebih tepat sasaran.
3. Kepada orang tua agar lebih memperhatikan keperluan anaknya selama menjalani pendidikan dan menggunakan dana PIP untuk kepentingan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar.
- Abidin, said Zainal. 2019. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Abdal, A. 2015. Kebijakan publik: Memahami konsep kebijakan publik. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Anggraeni, Sofi. 2019. *Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar (PIP-SD) di Kantor Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang*.
- Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.
- Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- Edwards George C, DRS. AG. Subarsono, M.Si., MA, 2020 *Analisi Kebijakan Publik*. Pustaka Belajar : Yogyakarta.
- Mulyadi. 2018, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : CV Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolog, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta Pusat
- Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi
- Bahasa. 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online
- <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/1005?articlesBySimilarityPage=6>. Efektivitas Program Kip-K Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (Stia) Amuntai.
- Sartika, 2018. *Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana kabupaten Maros*.
- Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka belajar Cetakan Ketujuh
- Sugiyono. 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung Alfabeta
- SitiMarwiyah, 2022. *Kebijakan Publik administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan analisis*



*dan evaluasi.*Jakarta: CV Mitra Ilmu

Tim Penyusun. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi sarjana Strata 1 (S1)*, Amuntai: Sekolsh Tinggi Ilmu Administrasi.

Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Pengantar Analisis Kebijakan*. Jakarta:Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).